

Agenda Nilai Nilai Dasar PNS

ETIKA PUBLIK

MASUK



24 Jam Pelajaran

#LatsarKemenkeu2019

MENU UTAMA

KODE ETIK & PERILAKU PEJABAT PUBLIK

BENTUK BENTUK KODE ETIK & IMPLIKASINYA

ETIKA PUBLIK

AKTUALISASI ETIKAASN

SELANJUTNYA >

Agenda Nilai Nilai Dasar PNS

ETIKA PUBLIK



BAB I

BAB II

BAB III

MENU UTAMA

KODE ETIK &
PERILAKU
PEJABAT
PUBLIK

BENTUK
BENTUK
KODE ETIK &
IMPLIKASINYA

ETIKA
PUBLIK

AKTUALISASI
ETIKAASN

SIAP !

Agenda Nilai Nilai Dasar PNS

**ETIKA
PUBLIK**

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

BAB I

BAB II

BAB III

Kita akan mempelajari...

PENGERTIAN ETIKA

DEFINISI DAN LINGKUP ETIKA PUBLIK

PENGERTIAN KODE ETIK

DIMENSI ETIKA PUBLIK

KODE ETIK ASN

TUNTUTAN ETIKA PUBLIK DAN KOMPETENSI

NILAI-NILAI DASAR ETIKA PUBLIK

PERILAKU PEJABAT PUBLIK

KODE ETIK &
PERILAKU
PEJABAT
PUBLIK

SIAP!

Agenda Nilai Nilai Dasar PNS

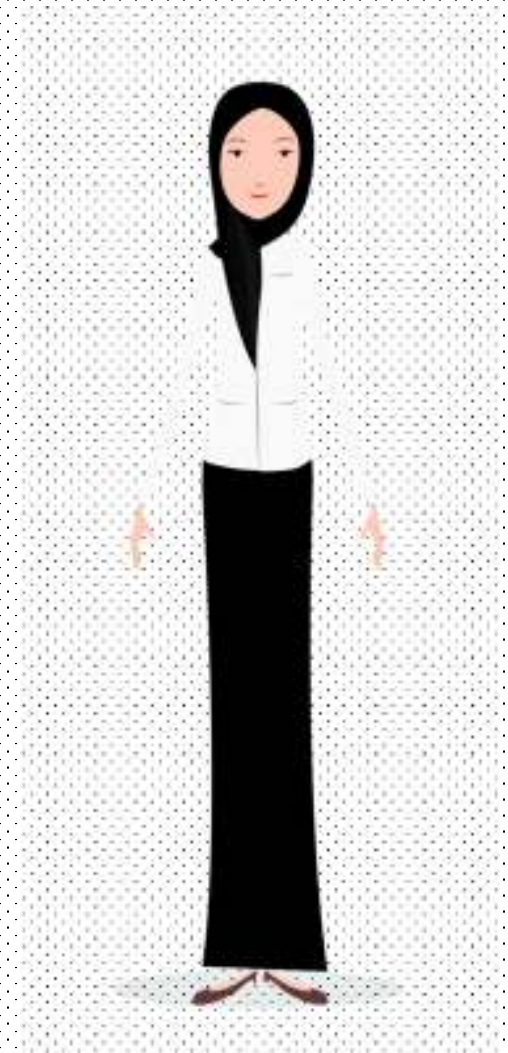
ETIKA
PUBLIK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, diharapkan anda akan:

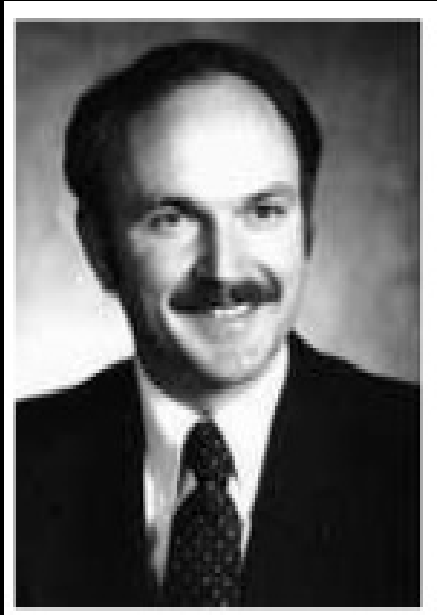
1. Memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik
2. Mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku serta implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku selama Diklat

SELANJUTNYA >





ETIKA



PENGETERIAN ETIKA
"the discipline dealing with what is
GOOD AND BAD
and with
moral duty
and
obligation



Wehrich dan Koontz (2005:46)



1

2

3

4

5



ETIKA

“adalah
tujuan hidup yang baik
bersama dan untuk orang lain
di dalam institusi yang adil”

Ricour (1990)



ETIKA
adalah
KARAKTER
atau **ETOS**
individu/kelompok
berdasarkan nilai-nilai dan
norma-norma
luhur
-----Azyumardi Azra-----



1

2

3

4

5



Jadi apa itu ETIKA?



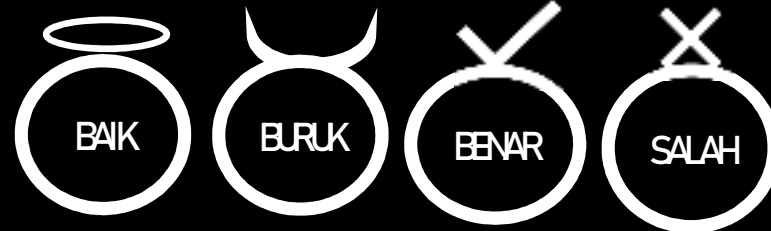
1 2 3 4 5



SELANJUTNYA >

ETIKA

adalah refleksi atas



Yang harus dilakukan atau bagaimana
Melakukan yang baik atau benar



SELANJUTNYA >



ETIKA PUBLIK



ETIKA PUBLIK

SELANJUTNYA >



refleksi tentang standar atau norma yang menentukan

**BAIK ATAU BURUK
BENAR ATAU SALAH**

perilaku, tindakan, dan keputusan
untuk mengarahkan kebijakan publik
dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.



SELANJUTNYA >



INTEGRITAS PUBLIK

menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara:

PENILAIAN KELEMBAGAAN,
DIMENSI DIMENSI PRIBADI, dan
KEBIJAKSANAAN

di dalam pelayanan publik



Haryatmoko

Filsuf / Dosen tetap Universitas Sanata Dharma
(Yogyakarta)



SELANJUTNYA >



KODE ETIK

SELANJUTNYA >



KODE ETIK

A
D
A
L
A
H

PERATURAN YANG MENGATUR TINGKAH LAKU dalam suatu kelompok khusus, sudut pandanganya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk **KETENTUAN KETENTUAN TERTULIS**



SELANJUTNYA >



SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA

DEGAN BAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- 8 -
Pasal 5

(1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.

(2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyebarkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang...

12 KODE ETIK ASN



3
NO
5
TH
20
14

- 9 -

k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan

l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

(3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


UNDUH



15 NILAI NILAI DASAR ETIKA PUBLIK



3
NO

5

TH

20

14



UNDUH

SELANJUTNYA >



Pasal 4

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

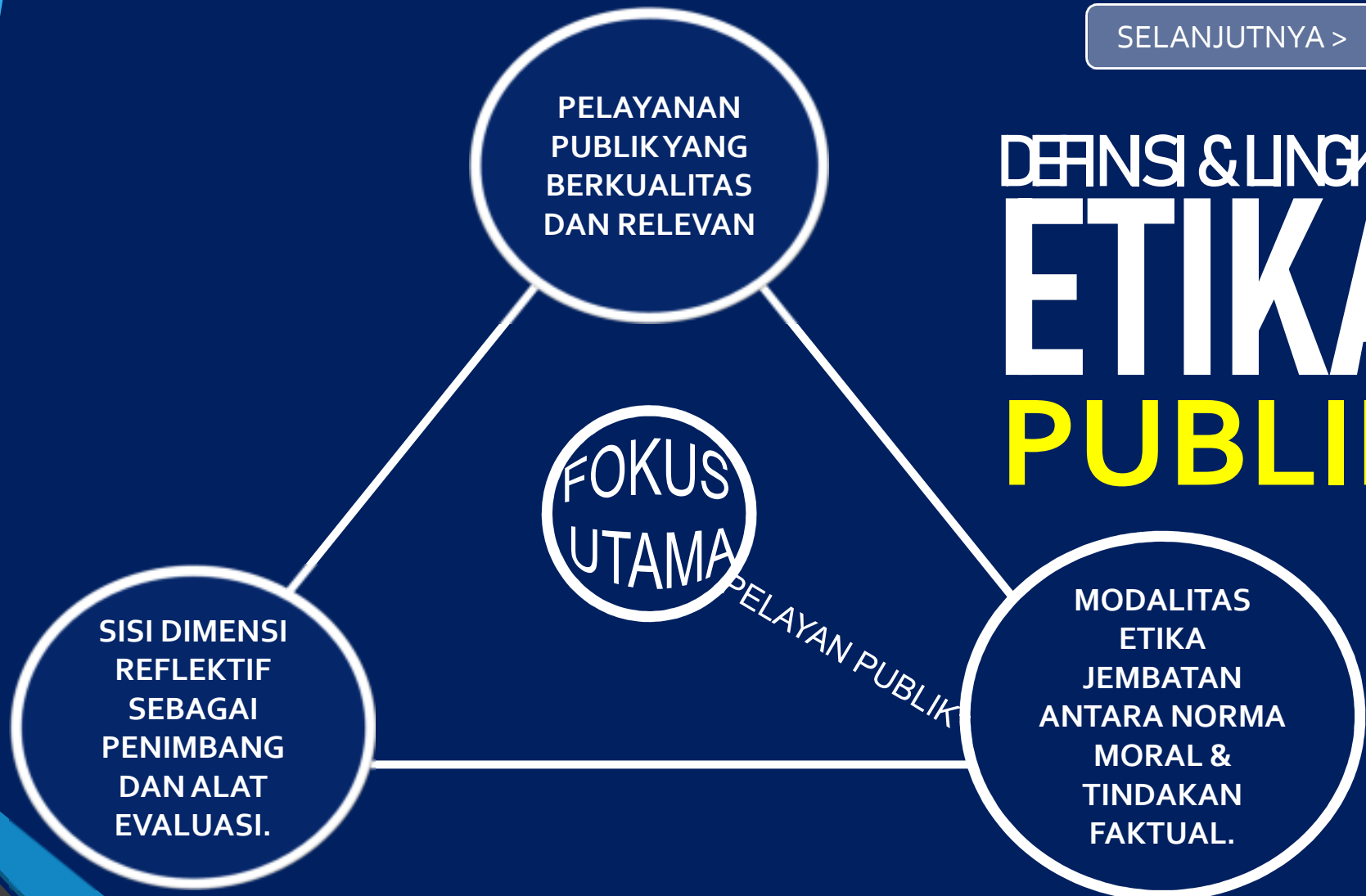
- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.



SELANJUTNYA >

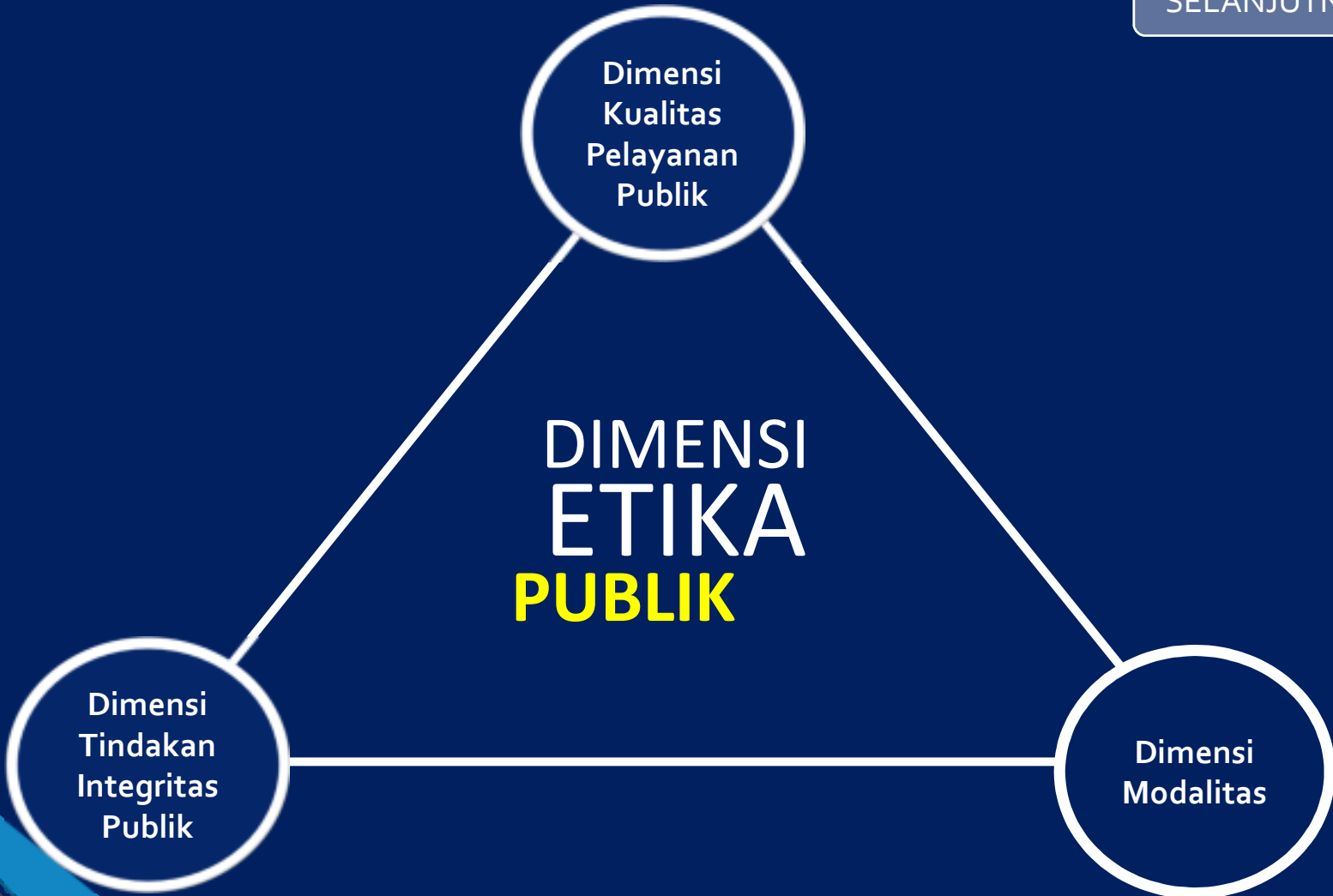


DEFINISI & LINGKUP ETIKA PUBLIK





SELANJUTNYA >





Dimensi
Kualitas
Pelayanan
Publik

Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik



Dimensi Modalitas

Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi dan netralitas

SILAHKAN KLIK UNTUK MELIHAT DEFINISI

AKUNTABEL

TRANSPARAN

NETRAL



AKUNTABEL

Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat.

Pada prinsipnya ada tiga aspek dalam akuntabilitas:

- a) Tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah.
- b) Memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi dan organisasi.
- c) Tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan public sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi

Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi dan netralitas

Dimensi
Modalitas

KEMBALI

DIMENSI
ETIKA
PUBLIK



TRANSPARAN



organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan.

Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi dan netralitas

Dimensi
Modalitas

KEMBALI

DIMENSI
ETIKA
PUBLIK



NETRAL



ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi dan netralitas

Dimensi
Modalitas

KEMBALI

DIMENSI
ETIKA
PUBLIK



SELANJUTNYA >



**Dimensi
Tindakan
Integritas
Publik**

Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan.



SELANJUTNYA >



TUNTUTAN ETIKA PUBLIK & KOMPETENSI

Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi **TIDAK PEKA, TIDAK PEDULI DAN DISKRIMINATIF**, terutama pada masyarakat kalangan bawah.

Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai **(kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dll)** dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain.



ETIKA & PUBLIK KOMPETENSI

SELANJUTNYA >



Apabila

suatu urusan diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran

...negara-rugi-rp-15-triliun-dan-korupsi...
 ...Akademy, negara merugi Rp 1,5 triliun dengan nilai swap sejumlah Rp 34 miliar. Setelah...
 ...pada 2016, kerugian negara terhadap...

...Kemenhub: Negara Rugi Rp 43 Triliun/Tahun Akibat Truk 'Obesitas'
 ...finance.detik.com/...kemenhub-negara-rugi-rp-43-triliun-tah...
 ...2018 - Setiap tahun negara mengalami kerugian Rp 43 triliun untuk memperbaiki jalanan yang...
 ...akibat truk obesitas

...Negara Rugi Rp 2,1 Miliar Jika Data 307 PNS Korupsi Tak Diblokir ...
 ...ekonomi.kompas.com - Ekonomi - Makro - Translate this page
 ...2018 - Pemblokiran tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian negara...

...Negara Rugi Rp 1,8 Triliun dari Kasus Pembobolan Bank Mandiri oleh ...
 ...ekonomi.kompas.com - Ekonomi - Makro - Translate this page
 ...2018 - Tambahkan Rp 400 miliar dari pembungaan awal kerugian negara sebesar Rp 1,4 triliun...
 ...jumlah bukannya.

...Muatan Truk Berlebih, Kemenhub: Negara Rugi Rp 43 Triliun ...
 ...bisnis.tempo.co - Bisnis - Translate this page
 ...2018 - Budi Karya Sunadi mengatakan negara rugi Rp 43 triliun akibat kerusakan jalan, yang...
 ...sebagian disebabkan muatan truk.

...Mahmudi Ismail Tersangka Korupsi, Negara Rugi Rp 10 Miliar ...
 ...bisnis.tempo.co - Bisnis - Translate this page



PERILAKU PEJABAT PUBLIK

SELANJUTNYA >



PERUBAHAN MINDSET

PENGUASA

PELAYAN

WEWENANG

PERANAN

JABATAN

AMANAHAH

SELESAI



8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI



Manajemen Perubahan



Penataan Peraturan
Perundang-undangan



Penataan dan Penguatan
Organisasi



Penataan Tatalaksana



Penataan Sistem
Manajemen SDM



Penguatan Akuntabilitas



Penguatan Pengawasan



Peningkatan
Pelayanan Publik



Yeeay SELAMAT ya
Kamu sudah selesai mempelajari BAB I
mengenai Kode Etik dan Perilaku
Pejabat Publik. Hayoo, kamu mau lanjut
ke BAB selanjutnya atau kita ulang lagi
nih supaya lebih jelas?

SIAP ! Lanjut

Siap !
Ulangi



Unsur
te University

MENU UTAMA



BAB I

BAB II

BAB III

Agenda Nilai Nilai Dasar PNS

ETIKA PUBLIK

Kita akan mempelajari...

1. Pentingnya Etika dalam Urusan Publik
2. Penggunaan Kekuasaan
3. Konflik Kepentingan
4. Sumber-Sumber Kode Etik Bagi ASN
5. Implikasi Kode Etik Dalam Pelayanan Publik

SIAP!

**BENTUK
BENTUK
KODE ETIK &
IMPLIKASINYA**

Agenda Nilai Nilai Dasar PNS

**ETIKA
PUBLIK**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, diharapkan anda akan:

1. Memiliki pemahaman tentang pentingnya etika dalam urusan pelayanan publik.
2. Memiliki pemahaman tentang penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan.
3. Memiliki pemahaman tentang konflik kepentingan.
4. Memiliki pemahaman tentang sumber-sumber kode etik bagi Aparatur Sipil Negara.
5. Memiliki pemahaman tentang implikasi kode etik dalam pelayanan publik.

SELANJUTNYA >



SELANJUTNYA >



PENTINGNYA



ETIKA

DALAM URUSAN PUBLIK



KEWASPADAAN
PROFESIONAL

Menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan.



KEWASPADAAN
SPIRITUAL

Penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggungjawab, serta akhlak dan perilaku yang baik

Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat, dan bukan sebagai tujuan



SELANJUTNYA >



PENGGUNAAN
KEKUASAAN
(LEGITIMASI KEBIJAKAN)

Legitimasi

berasal dari kata

Lex=Hukum

legitimasi
adalah

kewenangan
atau

keabsahan.



SELANJUTNYA >



PENGGUNAAN KEKUASAAN (LEGITIMASI KEBIJAKAN)

Legitimasi kekuasaan

Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar.

Legitimasi sosiologis

proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu.

Legitimasi etis

norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat

Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis.

PENGGUNAAN KEKUASAAN (LEGITIMASI KEBIJAKAN)

SELANJUTNYA >



Legitimasi etis

norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat

Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis.

ALASAN LEGITIMASI ETIS PENTING

- karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia
- legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia
- karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu.



SELANJUTNYA >



Setiap Pegawai Pemerintah
Harus Menghindari Adanya

KONFLIK KEPENTINGAN (Conflict Of Interest)

Dalam Pelaksanaan Tugasnya

SELANJUTNYA



KONFLIK KEPENTINGAN

adalah

TERCAMPURNYA



KEPENTINGAN PRIBADI

dengan

KEPENTINGAN ORGANISASI

yang mengakibatkan kurang optimalnya
PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI"

SELANJUTNYA >



KONFLIK KEPENTINGAN AKAN MENGAKIBATKAN



**PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN**



**PENGERAHAN SUMBER DAYA PUBLIK
YANG KURANG OPTIMAL**



**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT TERBAIKAN**

SELANJUTNYA >



bentuk perilaku **KONFLIK**

KEPENTINGAN



Aji mumpung
Loyalitas ganda
Menerima/memberi suap
Pemanfaatan informasi rahasia
Menyalahgunakan pengaruh pribadi



Pemanfaatan fasilitas organisasi/lembaga untuk kepentingan pribadi.



Beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk di dalam kategori konflik kepentingan



Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan



Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintah

SELANJUTNYA



Beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk di dalam kategori konflik kepentingan



Menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah



Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak



Tertalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah



SELANJUTNYA >



Sumber - sumber **KODE ETIK ASN**

*Klik segitiga untuk melihat/mengunduh isi peraturan

**Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 1959**
tentang Sumpah Jabatan
Pegawai Negeri Sipil dan
Anggota Angkatan Perang

**Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 1975**
tentang Sumpah/Janji
Pegawai Negeri Sipil

**Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980**
tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil



SELANJUTNYA >



Sumber - sumber **KODE ETIK** **ASN**

*Klik segitiga untuk melihat/mengunduh isi peraturan

**Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014**
tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN)

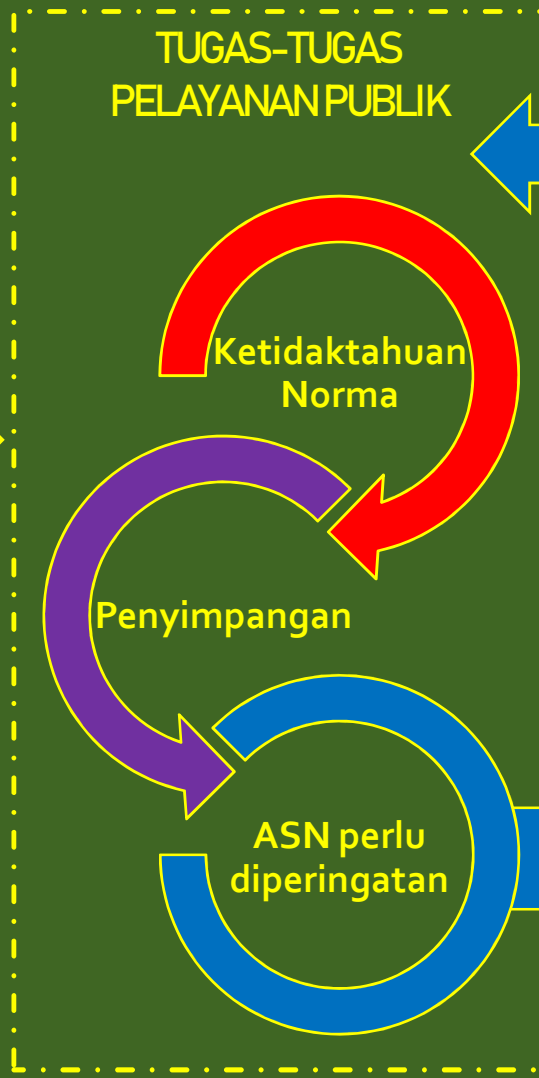
**Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010**
Tentang Disiplin PNS

**Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2004**
Tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil

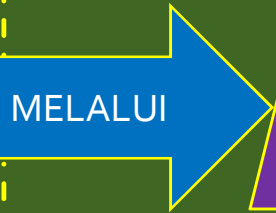


SELESAI

Implikasi
KODE
ETIK
 Dalam pelayanan
MENURUT
PAHAM
IDEALISME
ETIK



ASPEK
 PROFESIONALISME
 +
 ASPEK KOGNISI





MANTAP JIWAAA
Kamu sudah selesai mempelajari BAB II
BENTUK BENTUK KODE ETIK &
IMPLIKASINYA
. Hayoo, kamu mau lanjut ke BAB TIGA
atau kita ulang lagi nih supaya lebih
jelas?

SIAP ! Lanjut

Siap !
Ulangi



MENU UTAMA



SIAP !

Agenda Nilai Nilai Dasar PNS

**ETIKA
PUBLIK**



BAB I

BAB II

BAB III

Kita akan mempelajari...

1. Pemanfaatan sumberdaya publik
2. Absensi sidik jari
3. Pengangkatan tenaga honorer
4. Pemberian hadiah / cinderamata
5. Konflik kepentingan dalam pengadaan
6. Menjabat hanya 3 menit

SIAP!

**AKTUALISASI
ETIKAASN**

Agenda Nilai Nilai Dasar PNS

**ETIKA
PUBLIK**

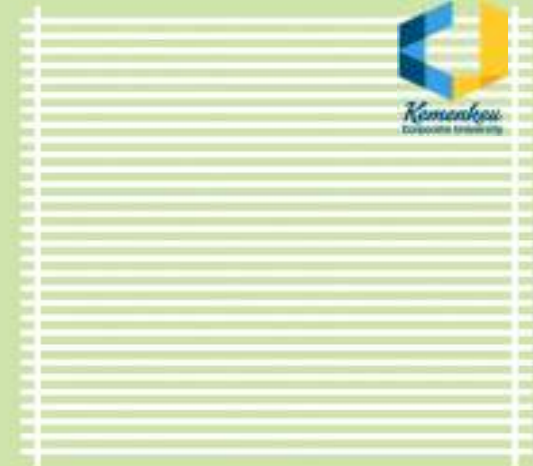
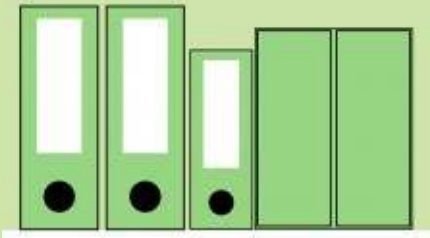
Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan keseluruhan materi pada Bab ini, peserta diharapkan mampu:

1. menjelaskan dan mengidentifikasi perilaku-perilaku di tempat tugas dan di lingkungan masyarakat yang ditengarai melanggar nilai-nilai etika publik.
2. Peserta juga diharapkan mampu mengaktualisasikan etika publik, baik dalam kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara maupun sebagai anggota masyarakat.

SELANJUTNYA >





SILAHKAN KLIK TOMBOL 1-6 PADA REMOT
UNTUK MEMUTAR VIDEO

PAHAM !

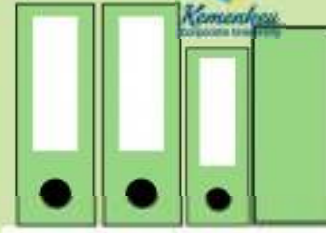
AKTUALISASI
ETIKA ASN

AKTUALISASI ETIKA ASN

PEMANFAATAN SUMBERDAYA PUBLIK



Kemendagri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Channel

1

AKTUALISASI ETIKA ASN ABSENSI SIDIK JARI



Kemendagri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



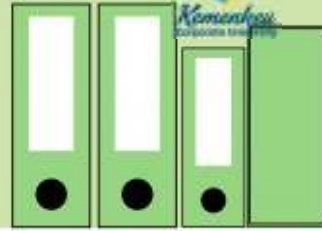
Channel
2



AKTUALISASI
ETIKA ASN
PENGANGKATAN TENAGA HONORER



Kemendagri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



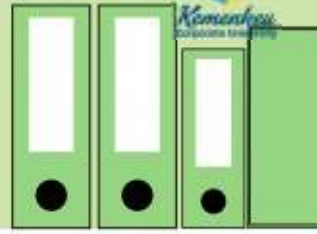
Channel
3



AKTUALISASI ETIKA ASN PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA



KEMKOMINFO
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

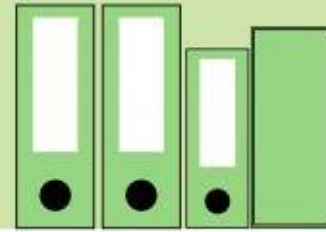


Channel
4



AKTUALISASI ETIKA ASN

Konflik Kepentingan Dalam Pengadaan



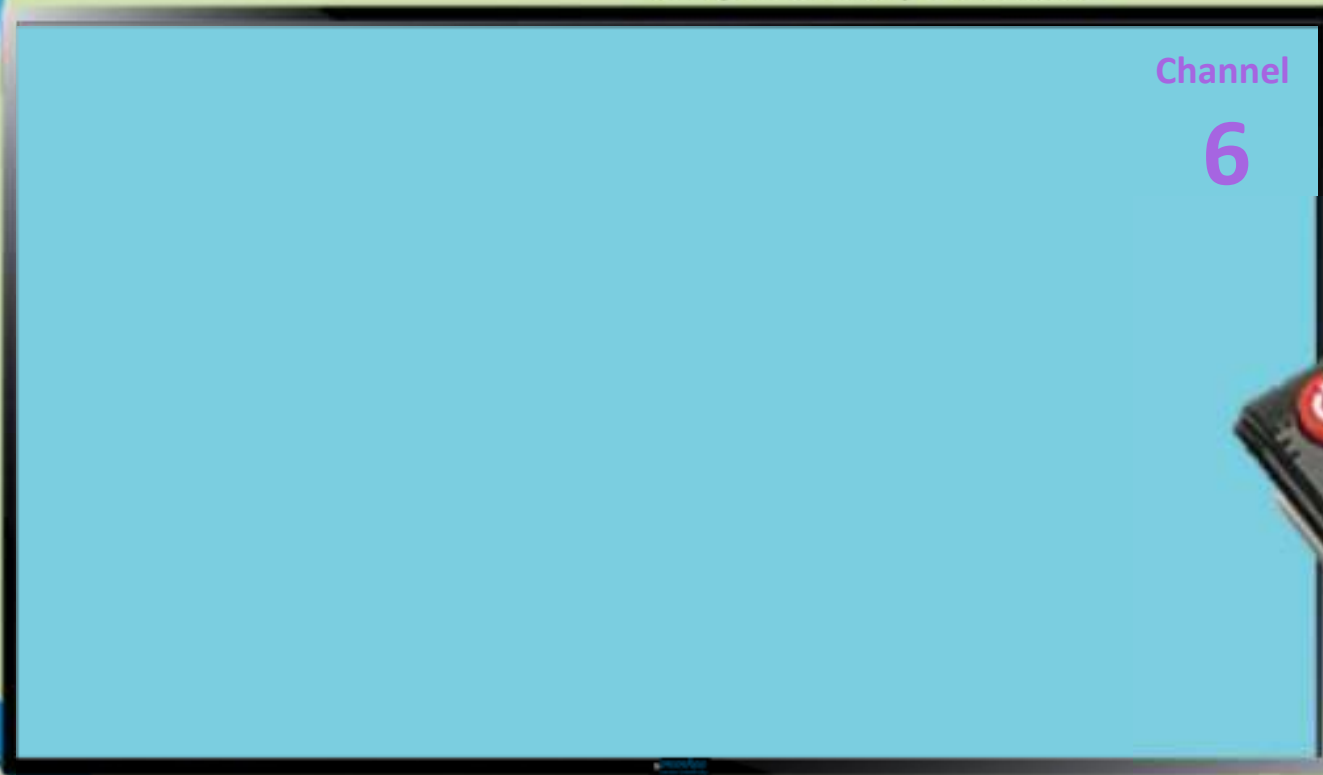
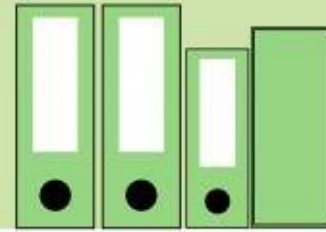
AKTUALISASI ETIKA ASN

Menjabat hanya 3 menit

Channel

6

SELESAI





Joos Gandos!
Ini adalah akhir dari bab 3, Aktualisasi
Etika ASN. Kamu mau ulang BAB 3 atau
langsung ikut Quiz Final nih?

SIAP ! Lanjut

Siap !
Ulangi



Universitas Jember
Jember University